

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Strategi

##### 1. Pengertian Strategi

Kata "strategi" berasal dari bahasa Latin *strategia*, yang berarti seni menyusun dan menerapkan rencana secara efektif demi mencapai tujuan tertentu. Strategi melibatkan langkah-langkah yang dirancang dengan pertimbangan matang agar tujuan dapat tercapai secara optimal. Dalam praktiknya, strategi berfungsi sebagai panduan terarah dalam mengambil tindakan maupun keputusan yang sesuai pada beragam kondisi, sehingga hasil yang diinginkan bisa tercapai dengan efektif dan efisien relevan terhadap tujuan dan kondisi yang sudah ditentukan.<sup>11</sup> Strategi sering digunakan dalam berbagai bidang seperti bisnis, politik, dan pendidikan. Secara umum, strategi adalah metode atau perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi membantu menentukan langkah-langkah efektif dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Dalam konteks apa pun, strategi memainkan peran penting sebagai panduan tindakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien. Oleh karena itu, strategi menjadi komponen penting

---

<sup>11</sup> Wahyudin Nur Nasution, *Strategi Pembelajaran*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), 3

dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.<sup>12</sup> Menurut Stehanie K. Marrus (dalam Isniati), strategi merupakan proses yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk merumuskan rencana dalam mencapai tujuan jangka panjang. Strategi ini juga mencakup penetapan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif, efisien, dan terarah. Dengan strategi yang tepat, pemimpin dapat mengarahkan organisasi atau kelompok menuju sasaran yang telah ditentukan, sekaligus mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk hasil terbaik.<sup>13</sup> Jadi strategi adalah tindakan yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Sasaran strategis harus dipertimbangkan secara menyeluruh antara tujuan yang ingin dicapai perusahaan dan filosofinya, sehingga sasaran strategis yang dipilih sesuai dengan keadaan internal perusahaan.<sup>14</sup> Dalam hal ini untuk merealisasikan sebuah target untuk meminimalisir kegagalan perlu adanya penyusunan strategi untuk membuka peluang agar target dapat tercapai.

Menurut Wina Sanjaya, sebagaimana dikutip dalam karya Nanang Gustri Ramdani, istilah "strategi" pada mulanya muncul dalam konteks militer. Istilah ini merujuk pada metode atau pendekatan dalam mengerahkan seluruh kekuatan militer secara optimal demi mencapai kemenangan dalam

---

<sup>12</sup> Nanang Gustri Ramdani, "Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran," *Jurnal of Elementary Education*, 2 no.1 (2023):

<sup>13</sup> Isniati, *Manajemen Strategik Intisari Konsep dan Teori*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 3

<sup>14</sup> Undang Juju, *Manajemen Strategi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2023), 22

pertempuran.<sup>15</sup> Pada dasarnya, strategi merupakan rancangan atau langkah-langkah yang disusun secara sistematis guna meraih suatu tujuan tertentu. Awalnya, konsep ini lebih banyak diterapkan dalam dunia militer, khususnya untuk memenangkan peperangan. Namun seiring waktu, pemakaiannya meluas ke berbagai bidang lain seperti pendidikan, bisnis, dan manajemen. Menurut Glueck dan Jauch, strategi adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir organisasi yang telah ditetapkan secara sistematis, mencerminkan arah tindakan dan keputusan penting demi keberhasilan jangka panjang dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di lingkungan eksternal dan internal.<sup>16</sup> Dari banyaknya perspektif diatas maka strategi merupakan sebuah perencanaan yang berorientasi pada masa depan. Strategi juga menghasilkan tujuan yang jelas karena adanya koordinasi tim kerja yang baik. Strategi tidak hanya terbatas pada konteks militer, tetapi telah berkembang menjadi konsep universal yang digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, dan bisnis dan sebagainya. Dalam konteks ini, strategi menjadi alat penting dalam menentukan arah tindakan, membuat keputusan, dan mengoordinasikan berbagai kegiatan demi mencapai hasil akhir yang diinginkan.

---

<sup>15</sup> Nanang Gustri Ramdani, "Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran," *Jurnal of Elementary Education*, 2 no.1 (2023):

<sup>16</sup> Murtiadi Awaluddin, "Pengaruh Kepribadian Enterpreneurship Islam dan Akses Informasi Terhadap Strategi Bisnis dan Kinerja Bisnis Usaha Kecil di Kota Makassar," *Jurnal iqtisaduna*, 3 no 1 (2017):

## 2. Fungsi Strategi

Strategi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut<sup>17</sup>

### a. Meningkatkan kekuatan dan stabilitas organisasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, stabilitas merujuk pada suatu keadaan yang tetap seimbang dan tidak gampang mengalami perubahan.<sup>18</sup> Dalam hal ini upaya untuk membuat organisasi menjadi lebih kuat dan lebih tahan terhadap gangguan, agar bisa bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Sehingga melalui literasi digital, Kementerian Agama mampu memperkuat diri sebagai garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan nilai moderasi di tengah zaman digital.

### b. Memberikan kepuasan kepada pelanggan

Kepuasan merupakan sejauh mana seseorang merasa puas setelah membandingkan hasil atau kinerja yang diterimanya dengan harapan yang dimiliki.<sup>19</sup> Kementerian Agama berusaha menjawab ekspektasi masyarakat dalam memperoleh pendidikan dan informasi keagamaan yang menyejukkan, damai, dan moderat melalui platform digital. Tingkat kepuasan ini terlihat dari semakin meningkatnya

---

<sup>17</sup> Umi Arifah, *Manajemen Strategi*, (Jawa: UNISNU PRESS, 2023), 7

<sup>18</sup> H. Nurhayat Indra, *Strategi Bisnis Koperasi & Usaha Mikro, dan Menengah (UMKM) Pasca Covid-19*, (Jawa Barat: IKOPIN, 2020), 62

<sup>19</sup> Heni Rohaeni, dkk. "Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan," *Jurnal Ecodemica*, 2 no.2 (2018): 46

kepercayaan publik terhadap peran Kemenag serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung nilai-nilai moderasi beragama.

c. Meraih sasaran kinerja yang telah ditetapkan

Kinerja diartikan sebagai output dari suatu pekerjaan, karena hasil tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pencapaian tujuan strategis organisasi serta memberikan kontribusi.<sup>20</sup> Literasi digital menjadi media dan metode strategis untuk mencegah degradasi moderasi beragama, dan keberhasilan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa sasaran kinerja Kementerian Agama tercapai.

3. Bentuk-Bentuk Strategi

Adapun bentuk bentuk strategi diantaranya<sup>21</sup>

a. Sasaran

Sasaran adalah apa yang hendak di capai.<sup>22</sup> sasaran dalam strategi merupakan apa yang ingin dicapai perusahaan, beberapa hal yang ingin dicapai yakni visi, misi, dan tujuan.

b. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuannya. Kebijakan merujuk pada sebuah tindakan

---

<sup>20</sup> Khairina Hazrati, "Peran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Sertifikat Terhadap Kinerja Pustakawan," *Jurnal Iqra'*, 11 no 2 (2017):19

<sup>21</sup> Umi Arifah, *Manajemen Strategi*, (Jawa: UNISNU PRESS, 2023), 7

<sup>22</sup> Hanan Fakhira Sa'diyah, dkk. "Penyusunan Sasaran dan Tujuan Pemasaran," *Jurnal Pendiidikan*, 2 no.1 (2019): 16

yang memiliki tujuan serta memiliki *outcomes* di masa depan.<sup>23</sup> Dalam hal ini kebijakan menjadi suatu tindakan strategis yang disusun sebagai pedoman, dengan fokus pada hasil yang ingin dicapai di masa depan.

c. Rencana

Rencana merupakan pernyataan tindakan manajer organisasi mengenai apa yang diharapkan terjadi. Perencanaan dapat dimaknai sebagai proses persiapan atas kegiatan yang akan dilakukan. GR Tery mendefinisikan perencanaan sebagai tujuan yang akan dicapai, dan berusaha untuk mencapainya.<sup>24</sup>

4. Indikator Strategi

Geoff Mulgan menekankan bahwa strategi sebaiknya difokuskan pada pendekatan yang ditujukan kepada lembaga-lembaga pembuat kebijakan, khususnya pemerintah. Dalam pandangannya, strategi memiliki fungsi penting sebagai suatu mekanisme yang mengelola kekuasaan serta distribusi sumber daya melalui institusi-institusi publik, agar penggunaan keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Eko Handoyo, *Kebijakan Publik*, (Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Penerbit Widya Karya, 2012) 4

<sup>24</sup> Mudatsir, *Perencanaan Program Pendidikan*, (Banten: SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), 28

<sup>25</sup> Septa Adinia dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Strategi Program Ketahanan Pangan dalam Menanggulangi Stunting di Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo," *jurnal Equilibrium*, 13 no 1 (2024):140

Ada beberapa indikator strategi pemerintahan di antaranya adalah:

1. *Purposes* (Tujuan)

Kata "tujuan" secara etimologis berakar dari bahasa Melayu atau Indonesia, dari kata "tuju" yang berarti mengarah atau bergerak ke suatu tempat atau keadaan. Penambahan akhiran "-an" menjadikan kata ini berarti hasil akhir dari proses tersebut, yaitu sasaran yang hendak dicapai.<sup>26</sup> Tujuan menurut Siagian adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu kegiatan yang dirancang secara sistematis.<sup>27</sup>

2. *Environment* (Lingkungan)

Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai ruang lingkup atau komunitas di sekitar kita. Selain itu, lingkungan mencakup semua hal yang secara bersama-sama mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Lingkungan juga merujuk pada segala sesuatu di sekitar manusia yang berperan dalam membentuk dan mempengaruhi perkembangan kehidupannya.<sup>28</sup>

3. *Direction* (Pengarahan)

Pengarahan merupakan proses di mana atasan memberikan panduan, arahan, dan instruksi kepada bawahan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) 25

<sup>27</sup> Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

<sup>28</sup> Dantje T. Sembel, *Toksikologi Lingkungan* (Yogyakarta: Andi, 2015), 1.

tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui kerja sama yang terarah dan terorganisir. Dalam konteks ini, pengarahan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi seseorang agar bersedia mengikuti arahan atau tujuan yang diinginkan. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan pribadi maupun otoritas jabatan secara bijaksana dan efektif, demi tercapainya tujuan organisasi dalam jangka panjang.<sup>29</sup>

#### 4. *Action* (Tindakan)

Menurut KBBI tindakan adalah perbuatan atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tindakan juga merupakan merupakan proses menjalankan rencana yang telah disusun guna meraih tujuan yang diinginkan<sup>30</sup>

#### 5. *Learning* (Pembelajaran)

Pembelajaran merupakan perubahan yang bersifat cukup permanen pada potensi perilaku seseorang, yang muncul sebagai akibat dari latihan yang diperkuat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Wayan Dunie, "Pengaruh Pengarahan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Telkom Belitung Oku Timur," *Jurnal Aktual STIE Trisna Negara* 16 no 2 (2018):110

<sup>30</sup> G.A. Kimble, *Hilgard and Marquis' Conditioning and Learning* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1961), 6.

<sup>31</sup> G. A. Kimble, *Hilgard and Marquis' Conditioning and Learning* (New York: Appleton-Century-Crofts, 1961), 6.

## B. Kementerian Agama

### 1. Mengetahui Sejarah Kementerian Agama

Kementerian Agama dibentuk pada 3 Januari 1946 sebagai upaya negara untuk menangani urusan keagamaan secara lebih sistematis dan terorganisir. Lembaga ini diharapkan mampu membangun hubungan harmonis antarumat beragama di Indonesia, sebuah negara yang dikenal memiliki keragaman agama yang tinggi. Saat itu, pengumuman pendirian Kementerian Agama disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia oleh pemerintah.<sup>32</sup> Pembentukan Kementerian Agama merupakan bentuk penghargaan atas sikap toleransi tokoh-tokoh Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu "beriman kepada Tuhan dan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya." Sikap ini mencerminkan semangat kebangsaan dan kesediaan untuk menjaga persatuan Indonesia dalam keberagaman agama dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Lembaga ini didirikan dengan tujuan utama untuk menangani serta mengatur berbagai persoalan keagamaan yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian selama era kolonial.<sup>33</sup>

### 2. Fungsi dan Tugas Kementerian Agama

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI (1946). Sejarah Pembentukan Kementerian Agama

<sup>33</sup> Sumarto, "Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama RI," *Jurnal Pendidikan Guru*, 3 no.1 (2021): 1

Kementerian Agama memiliki beberapa fungsi yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pelayanan keagamaan lintas agama, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, serta pendidikan keagamaan.
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas, pembinaan pegawai, dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unit kerja yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
- c. Mengatur dan mengelola seluruh aset milik negara yang berada dalam lingkungan kerja Kementerian Agama.
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di dalam internal Kementerian Agama guna memastikan kesesuaian dengan aturan dan tujuan organisasi.
- e. Memberikan bimbingan teknis dan melakukan supervisi atas pelaksanaan berbagai urusan keagamaan di tingkat daerah.
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan dengan urusan agama dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah.
- g. Menyelenggarakan sistem jaminan produk halal untuk memastikan kehalalan produk sesuai dengan standar yang berlaku.

- h. Merumuskan serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan-kebijakan di bidang keagamaan.<sup>34</sup>

Pembentukan Kementerian Agama merupakan bentuk penghargaan atas sikap toleransi tokoh-tokoh Islam yang menerima penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yaitu "beriman kepada Tuhan dan kewajiban menegakkan syariat Islam bagi pemeluknya." Sikap ini mencerminkan semangat kebangsaan dan kesediaan untuk menjaga persatuan Indonesia dalam keberagaman agama dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat.<sup>35</sup>

### C. Moderasi Beragama

#### 1. Arti Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio* yang berarti sikap tengah, tidak berlebihan, serta menghindari ekstremitas. Istilah ini mencerminkan keseimbangan dalam berpikir dan bertindak, penting dalam menjaga kerukunan, toleransi, serta mencegah konflik akibat pandangan yang terlalu keras atau fanatik. Moderasi mencerminkan keseimbangan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sosial, budaya, maupun beragama. Kata ini mencerminkan kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak bersikap ekstrem, baik dalam

---

<sup>34</sup> PMA RI. NO.25 Tahun 2024, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama*, halaman 3 <https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/2024pmagama025pdf.pdf> di akses tanggal 8 April 2025 Pukul 13.20 WITA

<sup>35</sup> *ibid*

bentuk berlebihan maupun kekurangan.<sup>36</sup> Dalam bahasa Arab, moderasi disebut *wassatiyah*, yang mencakup makna keadilan, keseimbangan, dan posisi tengah. Istilah ini menggambarkan sikap hidup yang tidak ekstrem, adil dalam berpikir, serta seimbang dalam bertindak dan bersikap. Moderasi adalah sikap atau pola pikir yang memilih jalan tengah, tidak berpihak secara ekstrem, serta mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam tindakan dan pemikiran, sehingga mendorong terciptanya harmoni dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>37</sup> Agama secara sederhana dipahami sebagai keyakinan manusia kepada Sang Pencipta yang disertai dengan aturan-aturan yang mengatur kehidupan, ibadah, dan hubungan antar sesama, yang diyakini sebagai pedoman hidup menuju keselamatan dan kebenaran sejati.<sup>38</sup> Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama yang mengedepankan keseimbangan, tidak berpihak pada ekstremisme, serta menjunjung toleransi, keharmonisan, dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang majemuk dalam keyakinan dan kepercayaan. Sikap ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara menjalankan keyakinan pribadi dengan menghargai keyakinan serta praktik keagamaan orang lain. Dalam konteks masyarakat

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 15

<sup>37</sup> Dahlia Lubis, *Potret Intelektual Perempuan: Pemecah Tembok Stigma* (Medan: Merdeka Kreasi, 2022), 227.

<sup>38</sup> Khalid Rahman, *Moderasi Beragama di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 4

Indonesia yang multikultural, pemahaman ini menjadi penting agar antarumat beragama dapat saling menghormati dan menciptakan kehidupan yang harmonis.<sup>39</sup> Sehingga moderasi beragama bukan sebuah pilihan melainkan sebuah keharusan.

Menteri Agama Republik Indonesia menyatakan bahwa konflik agama di Indonesia sering disebabkan oleh sikap eksklusif, yaitu ketika kelompok agama merasa paling benar dan menutup diri dari dialog atau kerja sama dengan pemeluk agama lainnya. Perselisihan antar kelompok agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat tidak didasarkan pada sikap toleran, yang menyebabkan perpecahan antar kelompok agama.

Salah satu prioritas utama dalam rapat kerja nasional Kementerian Agama pada tahun 2021 dan 2022 adalah memperkuat penerapan moderasi beragama. Upaya ini dianggap penting dalam menciptakan hubungan sosial yang rukun dan damai.<sup>40</sup> Melalui strategi ini, Kementerian Agama berupaya mengembangkan sikap beragama yang selaras dengan semangat kebangsaan, yaitu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pendekatan moderasi dalam beragama dipandang sebagai fondasi utama untuk menumbuhkan

---

<sup>39</sup> Lukman Hakim, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 18

<sup>40</sup> M Mukhibat, Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia (Wacana dan Kebijakan), *Jurnal Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia*, 4 no 1 (2023), 79

toleransi dan menjaga keharmonisan antarumat beragama. Sikap memilih jalan tengah dalam beragama serta menolak paham keagamaan yang ekstrem diyakini sebagai kunci dalam menciptakan suasana damai di tengah masyarakat.

#### Prinsip Dasar Moderasi Beragama<sup>41</sup>

- a. Adil, yaitu memberikan hak sesuai porsi dan menjalankan sesuatu secara tepat dan optimal
- b. Berimbang, yaitu bersikap netral tanpa keberpihakan

#### 2. Indikator Moderasi Beragama

##### a. Komitmen Kebangsaan

Secara etimologis, komitmen berasal dari bahasa Inggris *commit* yang menunjukkan keseriusan, ketulusan, dan kesungguhan seseorang dalam melakukan sesuatu. Komitmen mencerminkan sikap bertanggung jawab dan disiplin terhadap tugas atau kewajiban, baik terhadap diri sendiri, organisasi, orang lain, maupun hal tertentu.<sup>42</sup> Kebangsaan menyiratkan indeks sikap dan menjadi sangat penting ketika meninjau metode Pemikiran keagamaan setiap individu atau organisasi dan ekspresi ideologi nasional, terutama penerimaan yang teguh terhadap ideologi Pancasila yang telah menjadi dasar negara

---

<sup>41</sup> Ivan Ashif Ardana, *Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2023), 38-39

<sup>42</sup> Yudi Agung Dermawan, "PemPembinaan Antusiasme Beribadah dan Sikap Komitmen Kebangsaan pada Santri di Pondok Pesantren Mahasiswa Nurul Huda Blotongan Kota Salatiga Tahun 2023," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3 no.2 (2024): 84-85

Indonesia. komitmen kebangsaan merupakan komponen yang mendorong persatuan. Melaksanakan ajaran agama sejatinya sejalan dengan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Sebaliknya, menaati kewajiban sebagai bagian dari bangsa juga merupakan bentuk pengamalan nilai-nilai keagamaan.<sup>43</sup> Komitmen terhadap kebangsaan menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana seseorang memahami, bersikap, dan menerapkan ajaran agama secara selaras dengan nilai-nilai kebangsaan, khususnya dalam menerima Pancasila sebagai dasar ideologi negara yang menyatukan perbedaan dan memperkuat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis.

b. Toleransi

Secara etimologis, toleransi berasal dari bahasa Latin *tolerare*, yang berarti bersabar, menahan diri, atau kemampuan untuk bertahan dalam menghadapi perbedaan dan situasi yang tidak menyenangkan tanpa menunjukkan sikap permusuhan. Toleransi mencerminkan sikap terbuka dan menghargai keberagaman, baik dalam pemikiran, budaya, maupun keyakinan. Sikap ini penting dalam menciptakan kehidupan bersama yang harmonis di tengah masyarakat yang pluralistik. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal

---

<sup>43</sup> Novira Aulia, dkk. "Esensi Komitmen Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan," *Jurnal Media Hukum Indonesia*, 2 no.5 (2025): 46

sebagai *tolerance*, yang mencerminkan sikap menerima, menghargai, dan mengakui keberadaan keyakinan orang lain tanpa harus menyetujui atau menganutnya. Dalam pengertian istilah, makna toleransi tidak jauh berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa toleransi adalah bentuk sikap yang menunjukkan penghargaan, tenggang rasa, atau izin terhadap perbedaan, baik dalam hal pendapat, keyakinan, kebiasaan, maupun cara pandang seseorang. Max Isaac Dimon menambahkan bahwa toleransi merupakan sikap yang mendukung terciptanya kedamaian, serta tetap berada dalam koridor norma-norma sosial yang berlaku dan diakui bersama.<sup>44</sup> Toleransi adalah sikap terbuka dan sukarela dalam menerima perbedaan, terutama dalam hal keyakinan. Ini berarti memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain meskipun berbeda pandangan. Toleransi menjadi dasar terciptanya kehidupan yang damai, harmonis, dan saling menghargai di tengah masyarakat yang majemuk. Tidak hanya mencakup perbedaan agama, toleransi juga mencakup perbedaan ras, suku, budaya, dan latar belakang lainnya. Dengan bersikap toleran, kita membangun masyarakat yang inklusif, menghargai kemanusiaan, dan menjaga persatuan dalam keberagaman yang ada di sekitar kita.

---

<sup>44</sup> Nisha Novitasari, dkk. "Peran Pendidikan untuk Menumbuhkan Sikap Toleransi antar Umat Beragama," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5 no.3 (2021): 34

c. Anti Kekerasan

Secara etimologis, radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar atau kembali ke asal. Dalam konteks sosial, radikalisme mencerminkan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak secara ekstrem. Proses radikalisasi mengacu pada perkembangan ideologi radikal yang dapat menjadi awal seseorang menuju aksi terorisme. Meskipun demikian, tidak semua penganut radikalisme memilih kekerasan sebagai jalan. Namun, terorisme hampir selalu berakar dari paham radikal. Oleh karena itu, radikalisme menjadi faktor penting dalam memahami asal mula tindakan teror, meski belum tentu semua radikal menjadi teroris.<sup>45</sup> Anti kekerasan bertujuan untuk mengubah budaya perpecahan dan kekerasan menjadi budaya damai, toleransi dan empati.<sup>46</sup> Sehingga karena adanya tidakan radikalisme maka muncul ketidaksepahaman dan berdampak buruk bagi sekelompok orang.

d. Penerimaan Terhadap Tradisi

Ketidakadilan sering kali berakar dari sikap dan tindakan radikalisme. Individu berpemikiran moderat cenderung terbuka dan bersahabat terhadap keberagaman tradisi serta budaya lokal, selama

---

<sup>45</sup> Muhammad Harfin Zuhdin, "Radikalisme Agama dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Keagamaan," *Jurnal AKADEMIKA*, 22 no.1 (2017): 202

<sup>46</sup> Atikotul Izza Afkarina, dkk. "Pendidikan Anti Kekerasan Perspektif Al-Quran dan Hadits," *Jurnal Studi Islam*, 9 no.2 (2024): 233

tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agamanya. Mereka menghargai perbedaan dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat yang plural dan multikultural. Berbeda halnya dengan kelompok yang berpandangan eksklusif, yang menolak berkompromi terhadap nilai-nilai budaya dan tradisi karena dianggap dapat mencemari kemurnian agama yang mereka yakini.<sup>47</sup> Radikalisme sering memicu ketidakadilan karena sikap tidak toleran terhadap budaya dan tradisi masyarakat. Kelompok radikal cenderung menolak keberagaman, sedangkan individu moderat lebih terbuka dan menghargai budaya lokal, selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama mereka. Moderasi memungkinkan terciptanya harmoni sosial, mencegah konflik, dan mendorong sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan beragam.

#### **D. Degradasi Moderasi Beragama**

##### **1. Pengertian Degradasi**

Secara etimologis, degradasi berarti suatu kondisi penurunan atau kemunduran.<sup>48</sup> Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai merosotnya tingkat atau kualitas sesuatu, serta dapat menunjukkan adanya

---

<sup>47</sup> Jamaluddin, "Implementasi Moderasi Beragama di Tengah Multikulturalitas Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7 no.1 (2022): 45

<sup>48</sup> Amirotun Sholikhah, "Peran Keluarga Sebagai Tempat Pertama Sosialisasi Budi Pekerti Jawa Bagi Anak Dalam Mengantisipasi Degradasi Nilai-Nilai Moral," *Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, 15 no.1 (2020): 115.

perubahan ke arah yang negatif atau membawa dampak yang merusak.<sup>49</sup> Menurut Daryanto degradasi adalah adanya kemerosotan mutu atau kedudukan. Dalam hal ini yang dimaksudkan yakni turunnya kualitas dan munculnya kerusakan.<sup>50</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa Degradasi merupakan suatu penurunan kualitas, nilai, martabat, atau kondisi suatu hal dari keadaan yang baik ke keadaan yang lebih buruk.

## 2. Degradasi Moderasi Beragama

Degradasi moderasi beragama adalah penurunan sikap, nilai, atau praktik keagamaan yang moderat, sehingga mengganggu harmoni sosial dan mengurangi toleransi dalam kehidupan individu maupun masyarakat secara menyeluruh di tengah keberagaman yang ada. Moderasi beragama sendiri mengacu pada cara beragama yang tidak ekstrem, mengedepankan keseimbangan, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Ketika nilai-nilai ini mengalami degradasi, maka masyarakat akan cenderung bersikap intoleran, eksklusif, bahkan dapat terjerumus pada radikalisme dan kekerasan atas nama agama.<sup>51</sup> Degradasi moderasi beragama merujuk pada penurunan kualitas atau melemahnya sikap moderat dalam menjalankan ajaran agama. Ketika moderasi dalam beragama mengalami degradasi, maka potensi konflik

---

<sup>49</sup> Nurbaiti Ma'rufah dkk, "Degradasi Moral Sebagai Dampak Kejahatan Siber Pada Generasi Millennial di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7 no. 1 (2020): 16

<sup>50</sup> Ibid.,16

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Roadmap Moderasi Beragama*. Jakarta: Kemenag RI

antarumat beragama meningkat, nilai-nilai toleransi memudar, dan kerukunan sosial bisa terancam. Agama menjadi al yang sakral dalam kehidupan masyarakat, sehingga tanpa adanya sikap saling menghargai perbedaan, maka terciptanya konflik antar umat beragama akan memiliki potensi yang lebih besar. Dengan kata lain, degradasi moderasi beragama adalah kemunduran dari semangat beragama yang damai, terbuka, dan menghargai perbedaan menuju sikap sempit, keras, dan memecah belah.

## E. Literasi Digital

### 1. Pengertian Literasi Digital

Secara etimologi, literasi berasal dari kata *litterae* dalam bahasa latin yang mengandung makna *a learned person* (orang yang belajar) dan juga sering diberi penyebutan *littera* yang artinya tulisan-tulisan yang dikuasai dengan melibatkan kemampuan dan potensi manusia.<sup>52</sup> Ginting menyatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengelola dan memahami informasi melalui kegiatan membaca, menulis, berhitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Literasi tidak hanya mencakup pemahaman teks, tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan efektif dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan demikian, literasi menjadi bekal penting untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Di era digital, literasi merupakan tuntutan globalisasi

---

<sup>52</sup> Mahmud, dkk., *Literasi Pancasila: Inovasi Praktis Pembelajaran PPKN* (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023), 11.

untuk menciptakan manusia yang sadar akan pentingnya pengetahuan lewat membaca, menulis, berhitung serta dalam mengoperasikan teknologi.<sup>53</sup> Oleh karena itu, literasi dapat dipahami sebagai proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan keterampilan lainnya yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan serta menambah pengalaman seseorang.

Sebelum munculnya era digital dan internet, konsep literasi sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Pada masa itu, literasi dipahami sebagai kemampuan dasar membaca dan menulis. Aktivitas ini dilakukan secara langsung, baik melalui komunikasi lisan maupun media cetak seperti buku, surat kabar, majalah, dan koran. Literasi menjadi sarana utama dalam memperoleh informasi, menyampaikan gagasan, serta membentuk pola pikir masyarakat. Dengan demikian, kemampuan membaca dan menulis bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga bagian penting dari proses pendidikan dan perkembangan sosial budaya saat itu. Media cetak tersebut menjadi sarana utama dalam menyebarkan informasi dan pengetahuan di tengah masyarakat sebelum teknologi digital berkembang. Seiring perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kini literasi ikut berkembang. Literasi yang awalnya memanfaatkan media cetak sebagai bahan belajar, kini literasi

---

<sup>53</sup> Eva Susanti Ginting, "Penguatan Literasi di Era Digital", *Prosiding Seminar Nasional PBSI-II Tahun 2020*: 35.

semakin berkembang dan diperluas kedalam berbagai jenis elemen, seperti visual maupun audio yang disiapkan oleh media sosial lewat teknologi digital yang lebih mudah untuk diakses dan didapatkan.<sup>54</sup>

Secara etimologis, kata "digitalisasi" berasal dari kata "digital" yang berasal dari bahasa Yunani "digitus," yang berarti jari-jemari, karena manusia memiliki sepuluh jari yang digunakan untuk menghitung atau mewakili angka secara digital. Sejalan dengan itu, *digitus* juga sering ditafsirkan dengan angka 1 dan 0 yang artinya *yes* dan *no* atau *on* dan *off* (bilangan biner). Selain itu, angka 1 dan 0 juga diartikan sebagai jari-jemari manusia yang berjumlah 10. Dalam artian, *on* atau *off* nya alat-alat digital dikelola dan dikendalikan oleh jari-jemari manusia.<sup>55</sup> Rustam menyebut digitalisasi sebagai metode yang kompleks sehingga menjadi pokok dalam kehidupan manusia.<sup>56</sup> Dengan demikian, digital dapat diartikan sebagai peralihan aktivitas manusia yang dilakukan secara manual tanpa bantuan media, menjadi aktivitas yang mudah.

Saat ini, kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Manusia tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik dalam melakukan berbagai kegiatan karena banyak aktivitas kini dapat

---

<sup>54</sup> Yunus Abidin, dkk., *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca dan Menulis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 1, 2.

<sup>55</sup> Ronal Paul Sitompul, "Pelayanan Pemuda di Era Teknologi Digital" *ANTUSIAS: Jurnal Teologi dan Pelayanan*, 5, no. 1 (2017): 5.

<sup>56</sup> Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media: Analisis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital" *Islamic Communication Journal*, 1, no.1 (Mei-Oktober 2016): 44.

dijalankan secara cepat melalui sistem otomatis. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak signifikan di berbagai bidang, termasuk dalam dunia media. Secara umum, media berfungsi sebagai sarana penyampai pesan dari pihak pengirim (informan) kepada pihak penerima (komunikan). Media modern yang berkembang dewasa ini merupakan hasil dari interaksi antara manusia dan komputer yang terhubung melalui jaringan internet.<sup>57</sup> Akibatnya, komunikasi manusia saat ini mayoritas dilakukan lewat media yang sering diistilahkan media sosial (*medsos*) baik berupa audio, video, gambar dan pesan-pesan tertulis dalam media itu sendiri.

## 2. Penerapan Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menyampaikan, dan memanfaatkan informasi secara efektif melalui berbagai jenis media digital guna mendukung aktivitas belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan masyarakat digital saat ini. Dorongan terhadap kebutuhan akan informasi menjadi pemicu utama dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terus berlangsung hingga kini. Sejak kemunculan komputer pada era 1940-an, masyarakat mulai terbantu dalam memenuhi kebutuhan informasi melalui perangkat yang mampu mengolah data dengan berbagai cara sehingga informasi menjadi lebih

---

<sup>57</sup> Ibid, 45.

bernilai dan bermanfaat. Pada hakikatnya, literasi digital memiliki kedudukan yang sejajar dengan kemampuan dasar seperti membaca dan menulis, karena literasi juga mencakup tindakan-tindakan yang bermakna dan aplikatif.<sup>58</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenalkan literasi digital kepada masyarakat modern, khususnya generasi yang tumbuh di tengah arus deras informasi digital.

Literasi digital umumnya dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi, namun makna ini cenderung sempit dan perlu diperluas agar mencakup aspek kritis, etis, dan kreatif dalam penggunaan teknologi tersebut. Padahal, literasi digital juga menuntut keterampilan dalam menganalisis serta mengevaluasi informasi secara kritis guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan berkualitas. Dalam praktiknya, pesan-pesan yang disampaikan melalui media digital disusun sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal, bahkan dalam konteks komunikasi yang kompleks. Ruang lingkup literasi digital pun sangat luas dan kerap menyentuh isu-isu penting. Banyaknya informasi di internet memudahkan akses pengetahuan, namun juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi pengguna, seperti misinformasi, kecanduan digital, serta menurunnya kemampuan berpikir kritis jika tidak disikapi dengan bijak dan selektif.

---

<sup>58</sup> Feri Sulianta, *Literasi Digital, Riset dan Perkembangannya dalam Perspektif Social Studies*, (Jakarta:Andi, 2020) 34

Oleh karena itu, dengan tingginya angka pengguna internet di Indonesia, diperlukan adanya pedoman berupa etika atau tata cara yang dapat dijadikan acuan dalam berinternet secara bijak. Sebagai bangsa yang menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai pijakan utama, Indonesia mengedepankan berbagai norma sosial seperti kesantunan, keramahan, semangat kebersamaan, sikap toleran yang kuat, serta kehati-hatian dalam mencari kebenaran (tabayyun).<sup>59</sup> Sehingga karena luasnya cakupan literasi digital serta potensi dampak negatif dari konten internet, terutama di tengah tingginya jumlah pengguna di Indonesia, diperlukan pedoman atau etika berinternet sebagai acuan untuk berinteraksi secara bijak dan bertanggung jawab di dunia digital.

Penguatan literasi digital mendorong terciptanya masyarakat yang berpikir secara kreatif dan memiliki sudut pandang yang kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun tindak penipuan yang dilakukan melalui media digital. Dengan demikian, kondisi sosial masyarakat menjadi lebih aman dan kondusif. Keberhasilan dalam pengembangan literasi digital juga mencerminkan kemajuan di sektor pendidikan dan kebudayaan, karena menjadi salah satu tolok ukur pencapaian dalam dua bidang tersebut.<sup>60</sup> Kemampuan literasi digital memiliki peran penting dalam mengasah daya pikir kritis

---

<sup>59</sup> Ajani Restianty, "Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media," *Jurnal Kehumasan*, 1 no.1 (2018): 74.

<sup>60</sup> Rullie Nasrullah, dkk. *Materi Pendukung Literasi Digital*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 10.

serta keterampilan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Individu dengan pola pikir kritis cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, sehingga peluang untuk terjebak dalam situasi berisiko menjadi lebih kecil dan keputusan yang diambil pun cenderung lebih logis serta berdasarkan pertimbangan yang matang. Selain itu, mereka juga akan lebih terbuka dan bijak dalam memahami berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam praktiknya, literasi digital tidak hanya menuntut seseorang untuk mampu mencari dan menyaring informasi, tetapi juga mengharuskannya untuk mampu mengidentifikasi inti permasalahan dan mencari solusi yang tepat.<sup>61</sup>

Penyebaran isu dan informasi hoaks di media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah keagamaan pun tak luput dari dampak fenomena ini. Oleh karena itu, penerapan dan aktualisasi moderasi beragama menjadi langkah penting dalam menghadapi serta menangkal berbagai isu yang tersebar tersebut. Informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya perlu ditanggulangi, karena jika diterima secara luas oleh masyarakat, bisa menimbulkan disinformasi yang mengarah pada kebingungan.

Di era digital, penting untuk selalu mengutamakan informasi yang kredibel dan akurat guna mencegah penyebaran hoaks serta

---

<sup>61</sup> Riries Ernie Chthia, "Melangkah Bersama di Era Digital: Pentingnya Literasi Digital untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 no.3 (2023): 12

membentuk masyarakat yang kritis, cerdas, dan bertanggung jawab dalam menerima dan membagikan setiap informasi yang diterima. Masyarakat dituntut untuk cerdas dalam menyaring serta memahami setiap informasi yang diterima. Dalam konteks ini, moderasi beragama berperan sebagai benteng sekaligus alat untuk menghadapi dan memfilter informasi berkaitan dengan agama.